



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/622/436.1.2/2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/622/436.1.2/2010
TANGGAL : 30 Desember 2010

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025	Ruang lingkup yang diatur : 1. Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi daerah; 3. Analisis isu-isu strategis; 4. Visi dan misi daerah; 5. Arah kebijakan daerah pembangunan jangka panjang; 6. Kaidah Pelaksanaan;	V		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

					4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.			
2.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015	Ruang lingkup yang diatur : 1. Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi daerah; 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran; 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;	V	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Tahun 2011	

			<ol style="list-style-type: none">8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.			<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Perizinan Bab III Jenis Pelayanan Bab IV Persyaratan Bab V Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administratif Bab VIII Ketentuan Penyidikan Bab IX Ketentuan Pidana Bab X Ketentuan Peralihan Ban XI Ketentuan Penutup		V	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 4. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003

							7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Pelayanan Tera	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p> <p>Bab III Golongan Retribusi</p> <p>Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab X Penagihan</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Kerja Teknis Metrologi Legal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	

			<p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup</p>				<p>8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Perda	Metrologi Legal	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Wewenang Daerah Bab IV Pelayanan Metrologi Legal Bab V Kelembagaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administrasi Bab VIII Ketentuan Penyidikan Bab IX Ketentuan Pidana Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	
----	-------	-----------------	--	---	--	---	---	------------	--

4. DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Bab III Ketentuan Perizinan Bab IV Kewajiban Pemegang Izin Bab V Masa Berlaku Surat Izin Bab VI Penangguhan dan Pencabutan Izin Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Bab VIII Sanksi Administratif Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

2.	Perda	Retribusi Trayek	Izin	<p>Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran Bab X Penagihan Bab XI Kedaluwarsa Penagihan</p>	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. 2. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. 3. Inspektorat Kota Surabaya. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 6. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006.
----	-------	------------------	------	---	---	---	--	------------	--

			<p>Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Perda	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Maksud dan Tujuan</p> <p>Bab III Ruang Lingkup</p> <p>Bab IV Izin Penyelenggaraan</p> <p>Bab V Penyelenggaraan</p> <p>Bab VI Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Bab VII Pelaporan</p> <p>Bab VIII Sanksi Administratif</p> <p>Bab IX Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab X Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XI Ketentuan Penutup</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. 3. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. 4. Inspektorat Kota Surabaya. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 6. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 7. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	
----	-------	--	--	---	--	--	--	------------	--

4.	Perda	Perizinan Usaha dan Rekomendasi Jasa Bidang Perhubungan Laut.	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Perizinan Usaha Penyelenggaraan Jasa Bidang Perhubungan Laut</p> <p>Bab III Ketentuan Perizinan</p> <p>Bab IV Kewajiban Pemegang Izin</p> <p>Bab V Masa Berlaku Surat Izin</p> <p>Bab VI Penangguhan dan Pencabutan Izin</p> <p>Bab VII Perlindungan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Bab VIII Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab IX Ketentuan Pidana</p> <p>Bab X Ketentuan Peralihan</p> <p>Bab XI Ketentuan Penutup</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai. 	<p>9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	
----	-------	---	---	---	--	--	---	------------	--

5. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>Bab III Hak dan Kewajiban Peserta Didik, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Daerah</p> <p>Bab IV Jalur dan Jenjang Pendidikan</p> <p>Bab V Pendidikan Formal</p> <p>Bab VI Pendidikan Non Formal</p> <p>Bab VII Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah</p> <p>Bab VIII Pengawasan</p> <p>Bab IX Pendanaan Pendidikan</p> <p>Bab X Sanksi Administrasi</p> <p>Bab XI Ketentuan Pidana</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemenuhan Biaya Operasional Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 6. Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	

			Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Penutup				7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pemakaian Perumahan yang dikuasai dan diawasi Pemerintah Kota Surabaya	Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Pemakaian Perumahan Bab IV Izin Perumahan Bab V Perdamaian Bab VI Pengosongan Bab VII Penetapan Rumah Sewa Bab VIII Data Kepenghunan Bab IX Ketentuan Pidana Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Penutup	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Sewa Menyewa Perumahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 4. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 7. Bagian Hukum Kota Surabaya Sekretariat Daerah. 	Tahun 2011	

							8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran Bab X Penagihan Bab XI Kedaluwarsa Penagihan	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebakaran Kota Surabaya. 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

			Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

8. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon	Mencabut ketentuan retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Perda	Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p> <p>Bab III Golongan Retribusi</p> <p>Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab X Penagihan</p> <p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
----	-------	---	---	--	---	---	--	--	---

3.	Perda	Retribusi Pelayanan Persampahan	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p> <p>Bab III Golongan Retribusi</p> <p>Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab X Penagihan</p> <p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 3. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	<p>Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</p>
----	-------	---------------------------------	---	--	---	---	---	------------	---

			<p>Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa</p> <p>Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran</p> <p>Bab XIV Masa Retribusi</p> <p>Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya</p> <p>Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan</p> <p>Bab XVII Sanksi Administratif</p> <p>Bab XVIII Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab XIX Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XX Ketentuan Penutup</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Kesejahteraan Lanjut Usia	Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Bab III Wewenang dan Tanggung Jawab Bab IV Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Bab V Kelembagaan dan Koordinasi Bab VI Peran Serta Bab VII Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebakaran Kota Surabaya. 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

							7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

10. BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pemberian Insentif Bagi Investor yang Menanamkan Modalnya di Kota Surabaya	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan</p> <p>Bab III Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan</p> <p>Bab IV Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan</p> <p>Bab V Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan</p> <p>Bab VI Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Dapat diberikan</p> <p>Bab VII Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Bab VIII Sanksi Administrasi</p>	V		<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.</p> <p>3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.</p> <p>4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.</p> <p>5. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.</p> <p>6. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.</p> <p>7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.</p>	Tahun 2011	

			Bab IX Ketentuan Penutup				8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 9. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.		
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengelolaan Kualitas Air Bab V Pengendalian Pencemaran Air Bab VI Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber-Sumber Air Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Pelaporan Dugaan Pencemaran Air Bab IX Hak dan Kewajiban Bab X Peran Masyarakat Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

			Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Penutup						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi	Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Penyelenggaraan Jasa Titipan Bab IV Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bab V Kewajiban Pemegang Izin Usaha Telekomunikasi Bab VI Tim Pemantauan dan Penertiban Bab VII Pengawasan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	

13. DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penanggulangan HIV/AIDS	Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Sasaran Bab III Strategi dan Langkah-Langkah Penanggulangan AIDS Bab IV Pembentukan Kedudukan dan Tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bab V Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bab VI Peran dan Tanggung Jawab Pengidap HIV dan Penderita AIDS Bab VII Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS Bab VIII Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS	V		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

2.	Perda	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya	<p>Bab IX Sumber Dana Bab X Program dan Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS Bab XI Ketentuan Penutup</p> <p>Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Pelayanan Kesehatan Bab III Jenis Pelayanan Kesehatan Bab IV Izin dan Persyaratan Pelayanan Kesehatan Bab V Akreditasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan Bab VI Bentuk Kepemilikan Pelayanan Kesehatan Bab VII Pengaturan Investasi Asing Bab VIII Standar Pelayanan Kesehatan</p>	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	
----	-------	--	--	---	--	---	------------	--

			Bab IX Pembiayaan Kesehatan Bab X Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan Bab XI Peran Pemerintah Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perkoperasian	Bab I Ketentuan Umum Bab II Landasan, Asas dan Tujuan Bab III Bentuk dan Jenis Koperasi Bab IV Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi. Bab V Pembentukan Bab VI Keanggotaan Bab VII Kewajiban Koperasi Bab VIII Jaringan Pelayanan Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Kewajiban Pemerintah Daerah Bab XI Larangan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. 2. Inspektorat Kota Surabaya. 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya. 4. Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Keterbukaan dan Informasi Publik	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penyediaan Informasi Publik Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Tata Cara Perolehan Informasi Publik Bab V Kewajiban Pengguna Informasi Publik Bab VI Pembiayaan Bab VII Sanksi Administratif Bab VIII Ketentuan Penyidikan Bab IX Ketentuan Pidana Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. 5. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	.

							7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Tata Cara Perhitungan Retribusi Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Penyesuaian Tarif Bab IX Tata Cara dan Wilayah Pemungutan Bab X Saat Retribusi Terutang Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Tata Cara Pembayaran	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

			Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XV Keberatan Bab XVI Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XVII Kedaluwarsa Penagihan Bab XVIII Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

17. BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bab I Ketentuan Umum Bab II Barang Milik Daerah Bab III Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab IV Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab V Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Bab VI Perencanaan dan Pengadaan Bab VII Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Bab VIII Penggunaan Bab IX Pemanfaatan Bab X Pengamanan dan Pemeliharaan Bab XI Penilaian	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. 3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 3. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 	Tahun 2011	

			<p>Bab XII Penghapusan Bab XIII Pemindahtanganan Bab XIV Penatausahaan Bab XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab XVI Pembiayaan Bab XVII Ketentuan Lain-Lain Bab XVIII Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi Bab XIX Sengketa Barang Milik Daerah Bab XX Ketentuan Penutup</p>		<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>			
2.	Perda	<p>Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada</p>	<p>Bab I Ketentuan Umum Bab II Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Bab III Pelaksanaan dan Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal</p>	V	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya</p>		

			<p>Pemerintah Daerah Bab IV Pengawasan Bab V Ketentuan Penutup</p>		<p>3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1986 5.Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 6.Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum</p>	<p>3.Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya 4. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya 5.Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

18. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab III Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab IV Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal Bab V Peran Serta Anak Bab VI Forum Partisipasi Anak Bab VII Kelompok Kerja Perlindungan Anak Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. 4. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. 5. Dinas Sosial Kota Surabaya. 6. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2011	

18. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ketentraman Bab IV Ketertiban Umum Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penghargaan Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Sanksi Administratif Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Penutup		V	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. 2. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 3. Inspektorat Kota Surabaya. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. 6. Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Surabaya. 7. Dinas Sosial Kota Surabaya.	Tahun 2011	Pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 1955.

